

BAB IV

Kesimpulan

4.1 Kesimpulan

Adanya praktik perdagangan bebas (*free trade*) telah berdampak kepada pertumbuhan perekonomian setiap negara. Negara-negara menjadi terintegrasi satu sama lain dan membuat perdagangan internasional menjadi terbuka dan bebas. Namun perdagangan bebas tidak terlepas dari masalah-masalah yang diakibatkan dalam mengimplementasi perdagangan bebas dimana hal tersebut memunculkan permasalahan baru, yaitu masalah ketidakadilan (*unfairness*) dan masalah kerusakan lingkungan. Walaupun perdagangan bebas dinilai dapat meningkatkan perekonomian setiap negara, tetapi peningkatan tersebut hanya dirasakan oleh negara maju yang sejatinya negara tersebut memiliki kekuatan, modal ataupun kapabilitas yang besar dalam pasar sehingga mereka mampu mendominasi atau mengendalikan perdagangan internasional. Hal tersebut menyebabkan negara-negara yang memiliki kekuatan lebih mampu memaksimalkan keuntungan dari perdagangan internasional dan kondisi tersebut merugikan negara lain seperti negara-negara yang tergolong sebagai negara berkembang dan negara miskin dimana para produsennya mereka tidak mampu bersaing khususnya produsen kecil dengan produsen di negara-negara maju. Kondisi ini menimbulkan suatu gerakan perubahan

terhadap sistem perdagangan bebas yang dinilai hanya menguntungkan satu pihak dimana gerakan perubahan tersebut memberikan keadilan kepada kaum minoritas (*fair trade*).

Penelitian yang berjudul Implementasi Prinsip-Prinsip Fair Trade oleh Pekerti Nusantara terhadap Perajin bertujuan untuk menggambarkan bahwa Pekerti Nusantara berusaha dalam mengimplementasi prinsip-prinsip *fair trade* yang dilakukan Pekerti Nusantara kepada perajin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka khususnya para perajin kecil di Indonesia secara maksimal. Pekerti merupakan salah satu organisasi pengembangan sosial pertama yang menerapkan *fair trade* di Indonesia pada tahun 1975. Pekerti Dibentuk dikarenakan adanya revolusi hijau atau pembangunan industri pertanian pada masa pemerintahan orde baru. Kebijakan ini berdampak kepada masyarakat kecil yang tidak memiliki kemampuan dan keterampilan dikarenakan adanya perubahan sistem dari tradisional ke mesin. Selain itu, murahnya upah buruh dan kebijakan pemerintah yang dinilai pro investor manufaktur menyebabkan adanya eksploitasi buruh dan banyak produk-produk modern dimana produk-produk produsen kecil tidak mampu bersaing dengan produk tersebut yang dinilai murah dan memiliki kualitas yang bagus. Pekerti sendiri telah berkembang dan berada di hampir seluruh kota dan pulau yang berada di Indonesia.

Dalam menjalankan sepuluh prinsip *fair trade* sesuai yang tertulis di

WFTO, Pekerti menjalankan delapan program, yaitu (1) penyediaan akses pasar bagi perajin; (2) penyediaan pelatihan bagi perajin; (3) penyediaan akses modal bagi perajin; (4) penyediaan program sosial; (5) kunjungan lapang ke tempat perajin; (6) mempromosikan fair trade; (7) penyediaan program tanggap darurat dan pemulihan ekonomi bagi korban bencana; (8) menyediakan pengembangan kapasitas bagi karyawan Pekerti. Setiap program maupun kriteria Pekerti telah mewakili ke sepuluh prinsip *fair trade* dimana salah satu contohnya pada prinsip pertama yaitu menciptakan peluang bagi produsen kecil dengan melaksanakan program pemberian modal, pembayaran dp 50% pembelian produk, dan secara aktif mencari perajin yang potensial untuk dikembangkan. Pada prinsip kedua untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas, Pekerti melaksanakan program kunjungan lapang ke tempat perajin, menyelenggarakan pertemuan silaturahmi antara Pekerti dan Perajin. Prinsip ketiga untuk menerapkan praktik perdagangan yang adil melalui program pembayaran dp 50% pembelian produk dan program pelatihan cost pricing. Prinsip keempat untuk menerapkan pembayaran yang adil, Pekerti melaksanakan program pembayaran dp 50% terhadap pembelian produk. Prinsip kelima untuk memastikan tidak ada tenaga kerja anak dan tenaga kerja paksa dengan membuat kriteria perajin yang ingin bergabung sebagai mitra Pekerti, begitupun prinsip 6 yang menjunjung tinggi komitmen tidak adanya diskriminasi, melaksanakan kesetaraan gender, pemberdayaan ekonomi

dan kebebasan asosiasi dengan memberikan pendidikan mengenai gender kepada mitra Pekerti. Dalam prinsip ketujuh dalam memastikan kondisi layak kerja, Pekerti secara rutin melakukan kunjungan lapang ke tempat perajin dan penyaluran program asuransi kepada mitra Pekerti. Prinsip kedelapan untuk menyediakan pembangunan kapabilitas, Pekerti secara rutin mengadakan pelatihan untuk para mitra Pekerti dan karyawan Pekerti. Prinsip kesembilan dalam berupaya mempromosikan fair trade, Pekerti secara rutin melaksanakan kampanye online atau sosialisasi yang bertemakan fair trade dan pemberian kalender maupun stiker yang bertemakan fair trade. Prinsip sepuluh dengan berusaha menghormati lingkungan, Pekerti melakukan seleksi kriteria bahan produk dan secara aktif mengkampanyekan pelestarian lingkungan dan juga melakukan penanaman pohon. Dengan penjabaran tersebut, terbukti bahwa Pekerti Nusantara telah berusaha dalam mengimplementasikan sepuluh prinsip-prinsip *fair trade* yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan para perajin di Indonesia secara maksimal walaupun dalam praktiknya masih jauh dari sempurna.

Daftar Pustaka

BUKU

- Bworn, Michael Barrat. *Fair Trade: Reform and Realities in the International Trading System*. London & New Jersey: Zed Books. 1993.
- Djajanto, W., Atmakusumah, dan Iskandar, M. *Yang Melesat dan Terhempas: Bisnis Kecil Bertarung dalam Krisis Ekonomi*. Jakarta: LPDS bersama The Asia Foundation. 1998.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002.
- Hadiwinata, Bob Sugeng. *The Politics of NGOs' in Indonesia: Developing Democracy and Managing development*. London and New York: Routledge Curzon, 2003.
- Hadiwinata, Bob Sugeng dan Aknolt K. Pakpahan. *Fair Trade: Gerakan Perdagangan Alternatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Hadiwinata, Bob Sugeng dan Aleksius Jemadu. *Praktek dan Gerakan Fair Trade di Indonesia: Studi Kasus Oxfam-Great Britain Indonesia*. 2004.
- Jemadu, Aleksius. *Politik Global dalam Teori & Praktik*. Yogyakarta: Graha ilmu, 2008.
- Karns, Margaret P. dan Karen A. Mingst. *International Organization: The Politics and Processes of Global Governance*. London: Lynne Rienner Publishers, Inc. 2004.
- Partomo, Tiktik Sartika dan Abd. Rachman Soejoedono. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2004.
- Ramson, David. *The No-NonSense Guide to Fair Trade*. Oxford: New Internationalist Publications. 2009.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.

- Soobramanien, T. Y. & Worrall, L. *Emerging Trade Issues for Small Developing Countries: Scrutinising the Horizon*. (United Kingdom: Commonwealth Secretariat, 2017).
- Tambunan, Tulus. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES. 2012.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relations and World Politics 5th Edition*. USA: Pearson Education, Inc. 2013.
- Viotti, Paul R. dan Mark V. Kauppi. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*. USA: Allyn and Bacon.
- Wilkinson, Paul. *International Relations: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press. 2007.

JURNAL

- Amagoh, Francis. "Improving the Credibility and Effectiveness of Non-Governmental Organizations". *Progress in Development Studies* 15, no. 3. (2015), 221-222.
- Biggs, Stephen and Lewis, David. "Fair trade and organizational innovation in Nepal: lessons from 25 Years of growth of the Association of Craft Producers (ACP)". *European Journal of Development Research*, 21. (2009).
- Brock, John R. dan Jane S. Lopus. "A Note on Teaching About Fair Trade", *American Economist* 60, no. 1. (2015): 74-78.
- Cooper, Richard N. "Boom, Crisis, and Adjustment – A Summary," *World Bank Report*. (1994): 8.
- Nasution, Ryan Harris. "Penerapan Prinsip Fair Trade dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Kopi di Jawa Barat". *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol.10 No.2. (2019).
- Suradi, "Kolaborasi LSM dengan Pemerintah, Kajian tentang Pengembangan Kolaborasi LSM dengan Pemerintah dalam Pembangunan Masyarakat", *Jurnal Informasi Permasalahan Sosial dan usaha Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8 No.3, (2003), 73-76.
- Syeirazi, M. Kholid. "Dilema Praktis Globalisasi Neoliberal" *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM* (2003): 5.

Yusida, Ermita dan Juwita P. R. Suwondo, “Is Fair Trade Really a Solution to Create Fairness in Agricultural Trade? — Case in Indonesia”, *International Journal of Trade, Economics, and Finance*, Vol.5, No.3, (06,2014).

SITUS WEB

Bot, Bernard dan Agnes van Ardenne-van der Hoeven. “The Role of NGOS and Private Sector in International Relations”, *Advisory Council in International Affairs*, 8 Januari 2007, Accessed on: February 20, 2020, url: <http://aiv-advies.nl/709/publications/advisory-reports/the-role-of-ngos-and-the-private-sector-in-international-relations>

Chaubey, Piyush Kumar. “Sociological Liberalism”, Accessed on: February 9, 2020, url: <http://www.iaspoliticalscience.com/sociological-liberalism/>

Forum Fair Trade Indonesia. Arum Dalu Mekar. Accessed on December 24 2020, url: <https://forumfairtradeindonesia.wordpress.com/members/arum-dalu/>,

“Neoliberalism: origins, theory, definition”, Accessed on: February 20, 2020. url: <http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/neoliberalism.html>,

Mitra Bali. *About Us*. Accessed on December 24 2020. Url: <http://mitrabali.com/about-mitra-bali/>,

NGO Global Network. *Definition of NGOs*. Accessed on: February 20, 2020. Url: <http://www.ngo.org/ngoinfo/define.html>,

Oxfam. *About Us*. Accessed on: February 29 2020. Url: <https://www.oxfam.org/en/what-we-do/about>

Pekerti. *Tentang Kami*. Accessed on: February 28, 2020. Url: <https://pekerti.com/id/tentang-kami/>

World Fair Trade Organisation, *10 Principles of Fair Trade*, Accessed on: March 22, 2020. Url: <https://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade>

WAWANCARA

Ahmad, Nur Aenah. wawancara personal. 15 November 2020. Via online. Jakarta.

Ichwani, M. wawancara personal. 23 December 2020. via online. Jakarta.

